

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI  
DI MIN PECABEAN KABUPATEN TEGAL**



**ABSTRAK PENELITIAN**

**Oleh:  
Abu Dharin, M.Pd**

**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2016**

## ABSTRAK

Judul: Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal

Masalah yang diteliti pada penelitian ini yaitu: 1) Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?; 2) Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?; 3) Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal? Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk menganalisis Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal; 2) menganalisis Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal; 3) menganalisis Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu: jenis penelitiannya penelitian dengan pendekatan kualitatif jenisnya naturalistik, sumber data primer penelitian adalah Kepala MIN Pecabean dan Guru, staff administrasi serta siswa MIN Pecabean. Metode pengumpulan data dengan interview, observasi dan dokumentasi. Penelitian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif *model Miles and Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai berikut: a) Sistem rekrutmen siswa baru MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara seleksi bukan tes, dengan cara *interview*, jumlah siswa baru yang diterima dibatasi jumlahnya sesuai dengan daya tampung kelas yang disediakan yaitu 2 kelas atau 56 siswa, sebab satu kelas maksimal 28 siswa. disamping itu orang tua/ wali siswa juga di interview dan di observasi dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana kemauan dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN Pecabean. b) MIN Pecabean memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu: (1) membiasakan dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, (2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, (3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, (4) membina dalam dirinya untuk berperilaku dengan akhlakul karimah, (5) bekerja sama dan setia terhadap teman. *Panca prasetya* peserta didik ini merupakan suatu sumpah setia siswa MIN Pecabean untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat. 2) Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan: a) Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara bendera setiap hari senin dan pada acara rapat pembinaan dewan guru pada setiap hari Rabu sore dan dengan cara budaya disiplin madrasah; b) Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean yaitu: jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli; c) Model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean ada tiga yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah; d) Strategi Pembiasaan yang dilaksanakan pada pendidikan anti korupsi di MIN

Pecabean Kabupaten Tegal yaitu: penyampaian komitmen anti korupsi dalam upacara, pengadaan kas sosial kelas dan pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan; 3) Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yakni dengan cara penilaian internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. sedangkan evaluasi pendidikan anti korupsi pada aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggungjawab, adil, sederhana, berani, kerja keras dan mandiri dilakukan dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas madrasah.

*Kata Kunci: Pendidikan, anti korupsi dan madrasah ibtidaiyah.*

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada era reformasi sekarang ini, Indonesia mengalami banyak perubahan. Perubahan sistem politik, reformasi ekonomi, sampai reformasi birokrasi menjadi agenda utama di negeri ini. Yang paling populer adalah masalah reformasi birokrasi yang menyangkut masalah-masalah pegawai pemerintah yang dinilai korup. Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan harapan dapat menghilangkan budaya-budaya buruk birokrasi seperti praktik korupsi. Reformasi birokrasi ini pada umumnya diterjemahkan oleh instansi-instansi pemerintah sebagai perbaikan kembali sistem remunerasi (penggajian) pegawai. Namun pada kenyataannya, tindakan korupsi masih terus terjadi walaupun sudah diberlakukan remunerasi gaji bagi pegawai pemerintah.

Korupsi yang terjadi di negeri ini sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa pula untuk memberantasnya.

Tindakan korupsi yang terus dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab tentu membuat situasi reformasi menjadi tidak baik serta mengganggu sendi-sendi demokrasi dan proses pembangunan. Hasil survei Transparency International pada Tahun 2011 menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di peringkat 100 dari 183 negara. Sekarang Indonesia sama dengan Djibouti (negara di Afrika Timur), dan di ASEAN Indonesia kalah dari Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan kita setara dengan Vietnam dan Timor Leste.

Terjadinya tindakan korupsi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power* dalam skala besar. Hal itu bisa dilihat di DPR, Menteri, kepala daerah, dan pegawai kementerian. Ada yang mengatakan bahwa sistem sekarang ini memberikan kemungkinan adanya perbuatan korupsi. Penindakan korupsi sekarang ini belum cukup dan belum mencapai sasaran. Upaya pemberantasan korupsi perlu ditambah dengan berbagai upaya di bidang pencegahan dan pendidikan.

Sekolah merupakan lembaga yang diidolakan dengan lembaga yang bebas dari praktik korupsi. Harapan dibebankan ke dunia pendidikan untuk membangun sikap anti korupsi, membangun sikap amanah (*trust*). Tuntutannya, sistem pendidikan harus dibenahi agar dapat menjawab tantangan tersebut. Ki Hajar Dewantara (1977: 14) menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intellect*) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.

Dalam teori pendidikan terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan. Pertama, ranah kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi baru. Kedua, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis,

teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain. Dari ketiga ranah pendidikan tersebut idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya hubungan antara perubahan sikap (afektif) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (kognitif) secara statistik cenderung berdiri sendiri.

Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas. Maka untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, (UUSPN, 2003: 13). Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral) dan psikomotorik (skill/keterampilan). Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik (guru) di sekolah, pembentukan aspek efektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan, pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak: orang tua, pendidik (guru), dan masyarakat (<http://wiryana-holistic.blogspot.com/2016/01/problem-sosial-dan-tri-pusat-pendidikan.html>).

Lickona (1991: 53), menyatakan bahwa untuk mendidik moral anak sampai pada tataran moral action diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang

berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang mantap, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena lillahi ta'ala, disiplin beribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan keperdulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang hahal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Kenapa, karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban (Azra, 2002), memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat.

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu harus ada kerja-kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Maka munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Karena, hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta-didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan bermasyarakat (Tilaar, 1999: 28).

Untuk membrantas korupsi membutuhkan waktu beberapa generasi. Itu pun kalau ada program yang dilakukan secara konsisten. Korupsi sudah

sedemikian "menggurita" dalam birokrasi negara dan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Paling dirugikan adalah rakyat banyak dan di antara lapisan masyarakat yang paling dirugikan adalah mereka yang jauh dari akses kekuasaan. Oleh sebab itu rakyat atau masyarakat berhak dan berkewajiban melakukan kontrol untuk menghentikan atau minimal menekan segala bentuk tindakan korupsi.

Kuncinya adalah perlunya pendidikan anti-korupsi bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umumnya, agar "melek" terhadap korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan anti-korupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, mulai dari pendidikan informal keluarga dirumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat, dapat mencegah, mengurangi, dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan sejak dini dan dimasukkan dalam proses pembelajaran mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Hal ini sebagai upaya membentuk perilaku peserta didik yang anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran. Inti dari materi pendidikan antikorupsi ini adalah penanaman nilai-nilai luhur.

Sekolah dapat mengambil peran strategis dalam melaksanakan pendidikan anti korupsi terutama dalam membudayakan perilaku anti korupsi di kalangan siswa. Pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan anti korupsi telah dilakukan di berbagai negara, negara-negara di Amerika, Eropa, Asia, Afrika maupun Australia. Di dunia telah dibentuk juga jaringan kerjasama antar-negara untuk memperkenalkan program pendidikan anti korupsi. Salah satu contoh pendidikan anti korupsi di Cina, yakni melalui *China on-line*, seluruh siswa di seluruh pendidikan dasar diberikan mata pelajaran pendidikan anti korupsi yang tujuannya adalah memberikan vaksin kepada pelajar dari bahaya korupsi. Dalam

jangka panjang generasi muda China bisa melindungi diri di tengah gempuran pengaruh kejahatan korupsi (Suyanto, 2005: 42).

Melalui pengembangan kultur sekolah, diharapkan siswa memiliki modal sosial untuk membiasakan berperilaku anti korupsi. Pendidikan anti korupsi seyogyanya diberikan kepada anak-anak sejak di bangku sekolah dasar (SD/MI). Anak-anak SD/MI yang berusia antara 7 sampai dengan 12 tahun dapat berpikir transformasi *reversible* (dapat dipertukarkan) dan kekekalan (Disiree, 2008: 2). Mereka dapat mengerti adanya perpindahan benda, mampu mengklasifikasi dalam level konkrit, mampu memahami persoalan sebab akibat yang bersifat konkrit.

MIN Pecabean merupakan madrasah ibtidaiyah yang berada di desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaan pendidikan di MIN Pecabean ini telah menggunakan kurikulum 2013 sejak tahun pelajaran 2014/2015. Di antara program kerja MIN Pecabean yaitu peningkatan akhlak peserta didik. Oleh karenanya siswa MIN Pecabean sudah diperkenalkan suatu tindakan dengan akibat yang baik dan yang tidak baik, termasuk pendidikan anti korupsi..

Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pendidikan Anti Korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimanakah pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?
2. Bagaimanakah proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?
3. Bagaimanakah evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal?



### **C. Tujuan dan Signifikansi**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.
2. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.
3. Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal.

Sedangkan signifikansi yang diharapkan dari penelitian pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yaitu:

1. Dapat memberikan kontribusi dalam mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.
2. Dapat memberikan rujukan bagi lembaga anti korupsi dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi sejak dini.
3. Sebagai rujukan bagi guru dan praktisi pendidikan dalam menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.
4. Dapat digunakan oleh para penanggungjawab pendidikan sebagai salah satu panduan untuk menerapkan pendidikan anti korupsi di sekolah terutama pada sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Konsep Pendidikan**

##### **a. Pengertian Pendidikan**

Secara etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani *paedagogike*. terdiri dari kata *pais* yang berarti anak dan kata *ago* yang berarti aku membimbing. Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*" (Soedomo A. Hadi, 2008: 17). Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak. Pendidikan secara terminologi, menurut M. J. Langeveld (Revrisond Baswir dkk, 2003: 108) yaitu: 1) Pendidikan merupakan upaya manusia dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. 2) Pendidikan ialah usaha untuk

menolong anak untuk melaksanakan tugas-tugas hidupnya agar dia bisa mandiri, *akil-baliq* dan bertanggung jawab. 3) Pendidikan adalah usaha agar tercapai penentuan diri secara etis sesuai dengan hati nurani. Pengertian tersebut bermakna bahwa, pendidikan merupakan kegiatan untuk membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan kemandirian.

Tilaar (2002: 435) menyatakan bahwa “hakikat pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu suatu proses yang melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya”. Mencermati pernyataan dari Tilaar tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa dalam proses pendidikan, ada proses belajar dan pembelajaran, sehingga dalam pendidikan jelas terjadi proses pembentukan manusia yang lebih manusia. Proses mendidik dan dididik merupakan perbuatan yang bersifat mendasar (fundamental), karena di dalamnya terjadi proses dan perbuatan yang mengubah serta menentukan jalan hidup manusia.

Emile Durkheim menyatakan “*education is the influence exercised by adult generation on those that are not yet ready for social life. Its object is to arouse and to develop in the child a certain number of physical, intellectual and moral states which are demanded of him by both political society as a whole and the special milieu for which he is specifically destined*”.(Jeanne H. Ballantine, 1983).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Senada dengan UU Sisdiknas tahun 2003, Muhammad Saroni (2011: 10) menyatakan bahwa, “pendidikan merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan

kondisi luar diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk *survive* yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan yang berlangsung dalam kehidupan.”

#### **b. Tujuan Pendidikan**

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikannya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3). Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk anggota masyarakat menjadi orang-orang yang berpribadi, berperikemanusiaan maupun menjadi anggota masyarakat yang dapat mendidik dirinya sesuai dengan watak masyarakat itu sendiri, mengurangi beberapa kesulitan atau hambatan perkembangan hidupnya dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun mengatasi problematikannya (Nazili Shaleh Ahmad, 2011: 3).

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mencermati tujuan pendidikan yang disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dikemukakan bahwa pendidikan merupakan wahana terbentuknya masyarakat madani yang dapat membangun dan meningkatkan martabat bangsa. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk investasi manusia yang dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kyridis, et

al. (2011: 3) mengungkapkan bahwa *“for many years the belief that education can increase social equality and promote social justice, has been predominant”*. Hal senada dikemukakan oleh Herera (Muhadjir Darwin, 2010: 271) bahwa *“melalui pendidikan, transformasi kehidupan sosial dan ekonomi akan membaik, dengan asumsi bahwa melalui pendidikan, maka pekerjaan yang layak lebih mudah didapatkan”*. Dari apa yang dikemukakan oleh Kyridis dkk dan Herera tersebut dapat memberi gambaran bahwa pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting dalam mencapai kesejahteraan hidup.

Todaro and Smith (2003: 404) menyatakan bahwa *“pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan manusia untuk menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.”* Dengan pendidikan akan terbentuk kapabilitas manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan. Hal senada juga diungkapkan oleh Bruns, dkk (2003: 1) bahwa: *Education is fundamental for the construction of globally competitive economies and democratic societies. Education is key to creating, applying, and spreading new ideas and technologies which in turn are critical for sustained growth; it augments cognitive and other skills, which in turn increase labor productivity.*

## **2. Konsep Korupsi dan Antikorupsi**

Istilah korupsi berasal dari kata Latin *“corruptus”* atau *Corruptio*. Kata *corruptus* yang semula berarti : *to abuse* (menyalah-gunakan“ atau *“to deviate”* (menyimpang). Dalam bahasa Belanda, korupsi berasal dari kata *corruptie*, yang turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata korupsi. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan busuk, palsu, dan suap (KPK,206). Dalam perkembangan semantisnya, kata korupsi diartikan sesuai perspektif yang dipergunakannya. Dalam dunia politik, korupsi sering diartikan sebagai *“abuse of public power”* untuk kepentingan pribadi atau kelompok (Choirul Fuad

Yusuf, 2010). Dari sisi moralitas atau humanitas, korupsi dikonotasikan sebagai *mode of conduct* yang menyimpang dari standar nilai-nilai kemanusiaan dan norma-norma kemasyarakatan (Martiman Projohamidjoyo, 2009).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, korupsi merupakan tindakan mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga atau kelompok tertentu (Martawiansyah: 2007). Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan asset negara. Pendidikan anti korupsi, dengan demikian, merupakan usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Dalam pendidikan anti korupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif maupun studi kasus. Selanjutnya pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan

yang diselenggarakan di sekolah/madrasah, dapat berbentuk penyisipan dalam materi mata pelajaran tertentu, diimplementasikan dalam bentuk materi kegiatan ekstra kurikuler siswa, dan melalui pengembangan budaya sekolah/madrasah.

### **3. Konsep Pendidikan Anti Korupsi**

#### **a. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi**

Wibowo (2013:38) menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam proses tersebut, Pendidikan Anti korupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai anti korupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi juga merupakan instrumen untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam menangkap konfigurasi masalah dan kesulitan persoalan kebangsaan yang memicu terjadinya korupsi, dampak, pencegahan, dan penyelesaiannya. Sistem pendidikan yang ikut memberantas korupsi adalah sistem pendidikan yang berangkat dari hal-hal sederhana (Supeno, 2009:239), seperti tidak mencontek, disiplin waktu, dan lain-lain.

Menurut Nuh (dalam Wibowo, 2013:38) menjelaskan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku anti koruptif. Sedangkan menurut Umar (dalam wibowo, 2013:38) menyatakan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi tidak lain untuk membangun karakter teladan agar anak tidak melakukan korupsi sejak dini.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan anti korupsi adalah menciptakan generasi muda bermoral baik serta membangun karakter untuk tidak melakukan korupsi sejak dini. Pendidikan

anti korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur ini lebih tersistem serta mudah terukur, yaitu perubahan perilaku anti korupsi. Perubahan dari sikap membiarkan dan memaafkan para koruptor ke sikap menolak secara tegas tindakan korupsi, tidak pernah terjadi jika kita tidak secara sadar membina kemampuan generasi mendatang untuk memperbaharui sistem nilai yang diwarisi (korupsi) sesuai dengan tuntutan yang muncul dalam setiap tahap perjalanan bangsa.

Hamalik (dalam Wibowo, 2013:126) menyatakan bahwa guru akan mampu mengemban dan melaksanakan tanggungjawabnya khususnya dalam internalisasi pendidikan anti korupsi jika memiliki berbagai kompetensi yang relevan. Misalnya guru harus menguasai cara belajar yang efektif, mampu mengajar di kelas, mampu menjadi model bagi siswa, dan lain-lain.

#### **b. Metode-metode pada Pendidikan Anti Korupsi**

Metode yang digunakan untuk pendidikan anti korupsi sebagai berikut :

##### 1) Metode demokratis

Metode demokratis menekankan pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan langsung melibatkan anak untuk menemukan nilai-nilai tersebut dalam pendampingan dan pengarahan guru. Anak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pendapat, dan penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Guru tidak bersikap sebagai pemberi informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi yang dihayatinya. Guru berperan sebagai penjaga garis atau koridor dalam penemuan nilai hidup tersebut. Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai diantaranya keterbukaan, kejujuran, penghargaan pada pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan hati dan toleransi. Melalui metode ini anak diajak untuk

mulai berani mengungkapkan gagasan, pendapat, maupun perasaannya. Tahap demi tahap anak diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini anak diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur.

2) Metode Pencarian bersama

Metode ini menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Pencarian bersama lebih berorientasi pada diskusi atas soal-soal yang aktual dalam masyarakat, di mana proses ini diharapkan menumbuhkan sikap berpikir logis, analitis, sistematis, argumentative untuk dapat mengambil nilai-nilai hidup dari masalah yang diolah bersama. Melalui metode ini siswa diajak aktif mencari dan menemukan tema yang sedang berkembang dan menjadi perhatian bersama. Dengan menemukan permasalahan, mengkritisi dan mengolahnya, anak diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang ada dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan demikian anak akan aktif sejak dalam proses pencarian tema atau permasalahan yang muncul dalam pendampingan guru.

3) Metode siswa aktif atau aktivitas bersama

Metode ini menekankan pada proses yang melibatkan anak sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan anak dalam kelompok mencari dan mengembangkan proses selanjutnya. Anak membuat pengamatan, pembahasan analisis sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong anak untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

4) Metode keteladanan

Dalam dunia pendidikan, apa yang terjadi dan tertangkap oleh anak bisa jadi tanpa disaring akan langsung dilakukan. Proses pembentukan kepribadian pada anak akan dimulai dengan melihat orang



yang akan diteladani. Guru dapat menjadi tokoh idola dan panutan bagi anak. Dengan keteladanan guru dapat membimbing anak untuk membentuk sikap yang kokoh. Keselarasan antara kata dan tindakan dari guru akan amat berarti bagi seorang anak, demikian pula apabila terjadi ketidakcocokan antara kata dan tindakan guru maka perilaku anak juga akan tidak benar. Dalam hal ini guru dituntut memiliki ketulusan, keteguhan, kekonsistenan hidup.

5) Metode *Live In*

Metode *Live in* dimaksudkan agar anak mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain langsung dengan situasi yang sangat berbeda dari kehidupan sehari-harinya. Dengan pengalaman langsung anak dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara periodik.

6) Metode penjernihan nilai atau klarifikasi nilai.

Latar belakang sosial kehidupan, pendidikan, dan pengalaman dapat membawa perbedaan pemahaman dan penerapan nilai-nilai hidup. Adanya berbagai pandangan hidup dalam masyarakat membuat bingung seorang anak. Apabila kebingungan ini tidak dapat terungkap dengan baik dan tidak mendapat pendampingan yang baik, ia akan mengalami pembelokan nilai hidup. Oleh karena itu, dibutuhkan proses penjernihan nilai atau klarifikasi nilai dengan dialog afektif dalam bentuk *sharing* atau diskusi yang mendalam dan intensif. Teknik mengklarifikasi nilai atau penjernihan nilai dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menentukan suatu nilai yang dianggap baik dalam menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang sudah ada dan tertanam dalam diri siswa (Sanjaya, 2006: 282).

**c. Model Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi**

Menurut Azumardi Azra (2006: 54), bahwa diantara model pembelajaran yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan antikorupsi yaitu *active learning* yang merupakan acuan dasar untuk proses pembelajaran pendidikan anti korupsi. Menurut Dikti (dalam Wibowo, 2013:54) ada beberapa model pembelajaran yang dapat mengaktifkan anak didik diantaranya adalah model pembelajaran berpusat pada siswa atau *student centered learning* (SCL). Kedua pendapat tersebut sama-sama memberi ruang lebih besar kepada peserta didik untuk aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Metode ini bisa digunakan dengan model yang variatif seperti *debate, problem based learning, ex change partner, games, role playing*, dan lain-lain.

**d. Evaluasi Pada Pendidikan Anti Korupsi**

Evaluasi yang dapat dilakukan pada pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah test dan non test. Menurut Azra (2006:16) menyebutkan bahwa evaluasi yang dikembangkan dalam proses belajar pendidikan anti korupsi terdiri dari dua macam, yaitu test dan non test (portofolio). Evaluasi dengan test menggunakan pertanyaan berbentuk essay untuk menguji pengetahuan (kognisi), sikap (afeksi), dan tindakan (psikomotorik) terkait dengan sejumlah masalah korupsi. Menurut Kemdiknas (dalam Wibowo, 2013:61) bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu.

**4. Konsep Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah**

**a. Pengertian Sekolah Dasar**

Suharjo (2006: 1) menyatakan bahwa “sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun.” Hal senada juga

diungkapkan Harmon & Jones (2005: 1) bahwa: *“Elementary schools usually serve children between the ages of five and eleven years, or kindergarten through sixth grade. Some elementary schools comprise kindergarten through fourth grade and are called primary schools. These schools are usually followed by a middle school, which includes fifth through eighth grades. Elementary schools can also range from kindergarten to eighth grade”*.

Pernyataan oleh Harmon & Jones agak berbeda dengan yang dikemukakan oleh Suharjo yaitu terletak pada usia. Jika Suharjo menyatakan sekolah dasar lebih ditujukan pada anak yang berusia 6-12 tahun, maka Harmon dan Jones menyatakan sekolah dasar biasanya terdiri atas anak-anak antara usia 5-11 tahun, atau TK sampai kelas enam. Kemungkinan perbedaan ini terletak pada fisik antara anak yang ada di Indonesia dan anak yang ada di negara Eropa dan sekitarnya.

**b. Tujuan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah**

Suharjo (2006: 8) mengemukakan tujuan pendidikan sekolah dasar sebagai berikut:

- 1) Menuntun pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, bakat dan minat siswa.
- 2) Memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar yang bermanfaat bagi siswa.
- 3) Membentuk warga negara yang baik
- 4) Melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan di SLTP
- 5) Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap dasar bekerja di masyarakat.
- 6) Terampil untuk hidup di masyarakat dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Tujuan pendidikan sekolah dasar lainnya dikemukakan oleh Eka Ihsanudin (2010) yaitu: (1) memberikan bekal kemampuan membaca,

menulis, dan berhitung, (2) memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya, (3) mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Jika dicermati, tujuan pendidikan SD yang dikemukakan oleh Suharjo dan Eka Ihsanudin memiliki kesamaan yaitu bahwa sekolah dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar bagi anak yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Selain itu, pendidikan sekolah dasar bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tingkat menengah.

### **c. Karakteristik Anak Sekolah Dasar**

#### **1) Perkembangan Fisik dan Kognitif**

Masa sekolah dasar berlangsung antara usia 6 – 12 tahun. Masa ini sering disebut juga masa sekolah, yaitu masa matang untuk belajar atau sekolah. Pada masa ini anak-anak lebih mudah diarahkan, diberi tugas yang harus diselesaikan, dan cenderung mudah untuk belajar berbagai kebiasaan seperti makan, tidur, bangun, dan belajar pada waktu dan tempatnya dibandingkan dengan masa pra sekolah.

Jamaris (2006:19) menyatakan bahwa perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif, artinya perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Setiap anak berkembang melalui tahapan perkembangan yang umum, tetapi pada saat yang sama setiap anak juga adalah makhluk individu dan unik. Pembelajaran yang sesuai adalah pembelajaran yang sesuai dengan minat, tingkat perkembangan kognitif serta kematangan sosial dan emosional. Anak sekolah dasar berada dalam masa keemasan disepanjang rentang usia perkembangan manusia.

Wolfgang dan Wolfgang (1992:14) mengatakan berkaitan dengan teori perkembangan, maka guru harus: (1) tanggap dengan proses yang terjadi dari dalam diri anak dan berusaha mengikuti arus perkembangan

anak yang individual, (2) mengkreasikan lingkungan dengan materi luas yang beragam dan alat-alat yang memungkinkan anak belajar, (3) memperhatikan laju dan kecepatan belajar dari masing-masing anak, dan (4) adanya bimbingan dari guru agar anak tertantang untuk melakukan sendiri.

Pada masa ini juga perkembangan kemampuan berpikir anak bergerak secara sekuensial dari berpikir konkrit ke berpikir abstrak. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Jean Piaget (Crain, 2004: 121-131) bahwa anak usia sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkrit. Pada tahap operasi konkrit ini anak sudah mengetahui simbol-simbol matematis, tetapi belum dapat menghadapi hal-hal yang abstrak. Dalam tahap ini anak mulai berkurang egosentrisnya dan lebih sosiosentris (mulai membentuk *peer group*). Akhirnya pada tahap operasi formal anak telah mempunyai pemikiran yang abstrak pada bentuk-bentuk yang lebih kompleks.

## 2) Hubungan Orang Tua dan Anak Sekolah Dasar

Santrock (2004: 349) menyatakan bahwa “*as children move into the middle and late childhood years, parents spend considerably less time with them*”. Pada usia akhir, waktu anak-anak bersama keluarganya cenderung berkurang. Hal ini dikarenakan anak lebih banyak di sekolah dan atau bermain dengan teman-teman sebayanya yang banyak menyita waktu. Anak tidak lagi puas bermain sendirian di rumah, karena anak mempunyai keinginan kuat untuk diterima sebagai anggota kelompok. Namun demikian, dalam hal penanaman norma sosial, kontrol, dan disiplin, orang tua masih memiliki peranan penting bagi anak.

Fuad Ihsan (2008: 63-64) menyatakan bahwa tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain: (a) memelihara dan membesarkannya, (b) melindungi dan menjamin kesehatannya, (c) mendidik dengan berbagi

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi hidupnya, (d) membahagiakan anak dunia dan akhirat dengan memberikannya pendidikan anak. Dari pernyataan ini, dapat dijelaskan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak. Pendidikan yang diberikan oleh orang tua adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya untuk memasuki masa depan yang lebih baik.

### 3) Pendekatan Pembelajaran Berpusat pada Anak

Pendekatan yang berpusat pada anak (*child centered approach*) adalah suatu kegiatan belajar dimana terjadi interaksi dinamis antara guru dan anak atau antar anak. Menurut Coughlin (2000:5), pendekatan yang berpusat pada anak diarahkan: (1) agar anak mampu mewujudkan dan mengakibatkan perubahan, (2) agar anak menjadi pemikir yang kritis, (3) agar anak mampu membuat pilihan dalam hidupnya, (4) agar anak mampu menemukan dan menyelesaikan permasalahan secara konstruktif dan inovatif, (5) agar anak menjadi kreatif, imajinatif dan kaya gagasan, dan (6) agar anak memiliki perhatian pada masyarakat, negara dan lingkungannya.

Berdasarkan pendapat Piaget, Erick Erickson dan Susan Isaac dalam Wolfgang dan Wolfgang (1992, 12-13) dijelaskan bahwa model berpusat pada anak sangatlah berbeda dengan model berpusat pada guru. Pada model yang berpusat pada anak pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan pada perkembangan (*developmental position*) dan kegiatan bermain (*play activity*), sedangkan pada model yang berpusat pada guru pendekatannya berdasarkan perilaku dikondisikan (*behavioral position*) dan kegiatan pembelajaran yang diatur oleh guru (*direct instruction*).

## E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Abdun Nafi, *Pendidikan Anti Korupsi: Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan*

*Anti Korupsi* (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan pendekatan pendidikan (*education approach*), hal ini dimaksudkan bahwa harus ada upaya secara preventif untuk mencegah budaya laten korupsi yang ada di Indonesia, penelitian juga menemukan bahwa selama ini kurikulum PAI belum memuat materi-materi tentang nilai-nilai anti korupsi, kontekstualisasi pendidikan Islam juga harus segera dilakukan sehingga sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian Abdun Nafi di atas ada persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang Pendidikan di MIN, akan tetapi focus dari penelitian Abdun Nafi adalah upaya secara preventif untuk mencegah budaya laten korupsi yang ada di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini focus penelitiannya terletak pada pengelolaan, proses dan output siswa pada pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean.

2. Penelitian Nuriani Laura Malau Gurning, *Implementasi Pendidikan Antikorupsi Melalui Warung Kejujuran di SMP Keluarga Kudus* (Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013)

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa warung kejujuran efektif dipakai sebagai sarana mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, hambatan dalam pelaksanaan warung kejujuran adalah masih adanya siswa yang melakukan kecurangan, pengelola warung kejujuran masih harus mengajar di kelas dan kadang muncul rasa jenuh. Usaha mengatasi dengan pemberian pengertian di kelas dalam pembelajaran antikorupsi dan sosialisasi ketika upacara bendera hari Senin, dan sesama guru saling menguatkan ketika mulai muncul rasa jenuh. Warung kejujuran berhasil membentuk karakter siswa yang jujur setidaknya selama mereka sekolah di SMP Keluarga, tapi para guru menyadari bahwa menanamkan nilai kejujuran pada siswa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan dan hasilnya tidak dapat dilihat dalam waktu dekat. Penelitian Derya Gogebakan di atas ada persamaannya dengan

penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji tentang *multiple intelligences*, akan tetapi focus dari penelitian Derya Gogebakan adalah pada bagaimana siswa belajar tergantung pada level kelas dan jenis kelamin, sedangkan pada penelitian ini focus penelitiannya terletak pada pengelolaan input, proses dan output siswa pada pembelajaran berbasis *multiple intelligences* di sekolah dasar.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif naturalistik. Ada tiga karakteristik dalam penelitian ini. Karakteristik pertama, peneliti sebagai instrumen utama mendatangi sendiri secara langsung sumber datanya. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari fenomena yang tampak dan terjadi di lapangan. Karakteristik kedua, mengimplementasikan data yang dikumpulkan dalam penelitian lebih cenderung dalam bentuk kata-kata daripada angka-angka, jadi hasil analisisnya berupa analisis kualitatif. Karakteristik ketiga, menjelaskan bahwa penelitian naturalistik lebih menaruh perhatian kepada sistematis proses yang terjadi, dan tidak semata-mata kepada hasil yang dicapai, segala aspek mendapat perhatian sepenuhnya dari peneliti, termasuk segala sesuatu yang mempunyai arti dalam riwayat kejadian, misalnya terjadinya, perkembangannya, dan perubahannya.

### **2. Setting Penelitian**

#### **a. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan fokus penelitian, lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian di MIN Pecabean Kabupaten Tegal. Pemilihan lokasi ini menggunakan *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan indikator-indikator yang telah di buat oleh peneliti sehingga MI dibandingkan dengan MI yang lain di Kabupaten Tegal (Sugiyono, 2007: 124). MI yang memenuhi persyaratan, maka MI itulah yang di ambil sebagai



tempat penelitian. Adapun MI yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu MIN Pecabean Kabupaten Tegal. Atas dasar pemikiran di atas, khususnya yang terkait dengan pendidikan Anti Korupsi di madrasah ibtidaiyah.

#### **b. Waktu Penelitian.**

Penelitian pendahuluan dilaksanakan pada semester kedua tahun pelajaran 2015/2016 pada bulan Januari 2016. Sedangkan penelitian lanjutan dilaksanakan pada semester dua tahun pelajaran 2015/2016 pada 1 Mei – 31 Juli 2016. Lama penelitian secara efektif berlangsung sekitar 3 bulan.

### **3. Unit Analisis**

Adapun subyek penelitian adalah Kepala MIN Pecabean, dewan guru, staff administrasi serta siswa MIN Pecabean Kabupaten Tegal dan obyek penelitiannya mengenai pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, peneliti dapat menetapkan tingkat kelengkapan dan kedalaman informasi sejalan dengan fokus penelitian.

### **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah orang, tempat, dan simbol, yang oleh Suharsimi Arikunto (2007: 114-115) disebut dengan tiga p, yaitu person, place, dan paper. Berdasarkan sumber data tersebut, maka jenis data yang dihimpun dari pelaku dalam penelitian ini berupa kata-kata, perbuatan, dan pikiran mereka, sedangkan jenis data dari non pelaku berupa data tertulis, situasi, aktivitas, benda-benda, dan lain sebagainya.

### **5. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Ada tiga teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

#### **a. Observasi**

Dalam penelitian ini, observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan konteks (hal-hal yang berkaitan di sekitarnya), sehingga peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Dengan menggunakan teknik

observasi non partisipan (tidak terlibat) secara langsung peneliti dapat memperoleh data tentang kondisi objektif MIN Pecabean Kabupaten Tegal, terutama keadaan sarana dan prasarana, pelaksanaan proses pembelajaran, aktivitas guru dan siswa dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari di sekolah.

b. Wawancara

Untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa tentang pendidikan anti korupsi, peneliti berkomunikasi langsung dengan responden melalui wawancara. Peneliti berusaha mengetahui bagaimana responden memandang dunia dari segi perspektifnya, pikirannya, dan perasaannya. Dalam penelitian ini peneliti melaksanakan wawancara tidak terstruktur.

c. Studi Dokumentasi

Yang dimaksud dengan studi dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang diteliti berupa catatan, transkrip, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam studi dokumentasi ini yang ditelaah adalah data dan informasi tertulis. Dokumen yang diteliti antara lain pedoman, juknis, surat-surat keputusan seluruh program yang dipedomani, beragam administrasi KBM guru, data personalia, data presensi, dan data prestasi siswa.

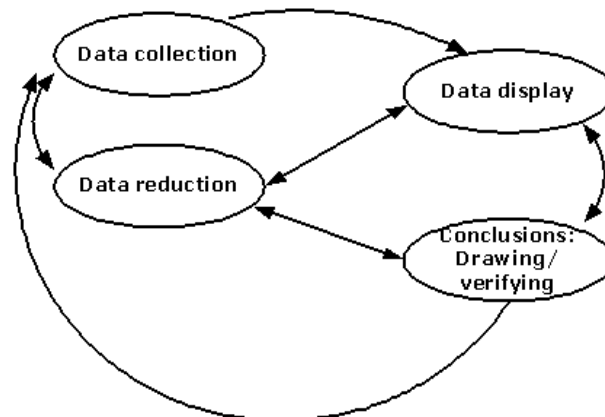
Sedangkan instrumen utama adalah peneliti sendiri, selanjutnya untuk mempertajam dan melengkapi data penelitian digunakan lembar pengamatan, panduan wawancara dan catatan lapangan. Lembar observasi digunakan untuk memperoleh data tentang profil masing-masing sekolah. Catatan lapangan digunakan untuk mencatat peristiwa, kejadian, gejala atau fenomena yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean. Sedangkan panduan wawancara digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data atau informasi/keterangan tentang berbagai hal yang membutuhkan pernyataan, pendapat, penegasan atau penjelasan lebih lanjut dari subjek penelitian.

## 6. Keabsahan Data

Untuk mengetahui keabsahan data, peneliti menggunakan teknik dan kriteria dengan menggunakan triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Triangulasi metode dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama dengan cara yang berbeda misalnya wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama melalui sumber yang berbeda. Triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Melalui teknik ini, dapat diketahui apakah nara sumber memberikan data yang relatif sama atau tidak pada waktu yang berbeda. Bila nara sumber memberikan data yang relatif sama, berarti data yang diperoleh telah kredibel.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis interaktif *Miles and Huberman* (1984), alur analisisnya seperti gambar berikut ini:



Gambar 1

Alur Analisis Data Kualitatif Berdasarkan “Model Interaktif”  
(Sumber: Miles, M. B. & Huberman, A. M, 1984)

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan menyajikan data inti/pokok, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan tajam mengenai hasil pengamatan, wawancara, serta dokumentasi. Reduksi data dalam penelitian

ini dengan cara menyajikan data inti/pokok yang mencakup keseluruhan hasil penelitian, tanpa mengabaikan data-data pendukung, yaitu mencakup proses pemilihan, pemuatan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan.

**b. *Display Data***

Supaya data yang banyak dan telah direduksi mudah dipahami baik oleh peneliti maupun orang lain, maka data tersebut perlu disajikan. Bentuk penyajiannya adalah teks naratif (pengungkapan secara tertulis). Tujuannya adalah untuk memudahkan dalam mendiskripsikan suatu peristiwa, sehingga dengan demikian, memudahkan untuk mengambil suatu kesimpulan.

**c. *Menarik Kesimpulan/Verifikasi***

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis dalam bentuk naratif. Kemudian melalui induksi, data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Apabila kesimpulan masih kurang mantap yang disebabkan kurangnya data dalam reduksi dan sajian data, peneliti bisa menggali lagi dari *field note* (catatan lapangan). Apabila dari *field note* juga tidak diperoleh data pendukung yang dimaksud, maka peneliti akan melakukan pengumpulan data lagi. Di situlah letak siklus dalam analisis data model analisis interaktif.

**G. Hasil Penelitian**

Hasil penelitian tentang pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yaitu:

1. Pengelolaan pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan sebagai berikut:
  - a) Sistem rekrutmen siswa baru MIN Pecabean dilaksanakan dengan cara seleksi bukan tes, dengan cara *interview*, jumlah siswa baru yang diterima

dibatasi jumlahnya sesuai dengan daya tampung kelas yang disediakan yaitu 2 kelas atau 56 siswa, sebab satu kelas maksimal 28 siswa. disamping itu orang tua/ wali siswa juga di interview dan di observasi dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana kemauan dan minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke MIN Pecabean.

- b) MIN Pecabean memiliki *Panca Prasetya* peserta didik, yaitu: 1) membiasakan dan melaksanakan peraturan dan tata tertib madrasah, 2) menghormati dan menghargai orang tua dan guru, 3) komitmen untuk menjaga sarana dan prasarana Madrasah, 4) membina dalam dirinya untuk berperilaku dengan akhlakul karimah, 5) bekerja sama dan setia terhadap teman. *Panca prasetya* peserta didik ini merupakan suatu sumpah setia siswa MIN Pecabean untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan madrasah maupun di masyarakat.

2. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal dilaksanakan dengan:

- a. Proses pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Tegal dimulai dengan adanya sosialisasi pada waktu upacara bendera setiap hari senin dan pada acara rapat pembinaan dewan guru pada setiap hari Rabu sore dan dengan cara budaya disiplin madrasah.
- b. Nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan pada diri siswa MIN Pecabean yaitu: jujur, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani dan peduli.
- c. Model dan pendekatan pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di MIN Pecabean ada tiga yaitu: model terintegrasi dalam Mata Pelajaran, Model di luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler, dan model pembudayaan, pembiasaan nilai pada seluruh aktivitas dan suasana di madrasah.
- d. Strategi Pembiasaan yang dilaksanakan pada pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yaitu: penyampaian komitmen anti

korupsi dalam upacara, pengadaan kas sosial kelas dan pengadaan pos kehilangan dan benda tak bertuan.

3. Evaluasi pendidikan anti korupsi di MIN Pecabean Kabupaten Tegal yakni dengan cara penilaian internal. Penilaian kelas merupakan bagian dari penilaian internal (*internal assessment*) untuk mengetahui hasil belajar peserta didik terhadap penguasaan kompetensi yang diajarkan oleh guru. sedangkan evaluasi pendidikan anti korupsi pada aspek kejujuran, disiplin, peduli, tanggungjawab, adil, sederhana, berani, kerja keras dan mandiri dilakukan dengan cara evaluasi objektif tentang kehadiran siswa, selain dapat dipakai untuk menilai dampak pendidikan anti korupsi dalam sertiap individu, juga dipakai sebagai evaluasi bagi peningkatan kualitas madrasah.

## H. Referensi

- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azra, Azyumardi, 2002. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas.
- Buchori, Mochtar.1994. *Ilmu Pendidikan dan Praktek Pendidikan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Budiningsih, C. A. 2004. *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Cropley. A.J. 1998. *Pendidikan Seumur Hidup, Suatu Analisis Psikologis*, (terj. Sardjan Kadir). Surabaya : Usaha Nasional.
- Dananjaya, Utomo. 2010. *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: Nuansa.
- Departemen Pendidikan Nasional.2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: pusat Bahasa Depdiknas.
- Depdiknas.2009. *Pembinaan Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*.Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_, *Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*

- \_\_\_\_\_, 2004. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi, Balitbang.
- \_\_\_\_\_, 2009. *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (life skill)*. Jakarta: Depdiknas.
- \_\_\_\_\_, 2009. Permendiknas nomor 63 Tahun 2009 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas.
- Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Pendidikan*, Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Fishbein, M, dan Ajzein I. 1975. *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Sydney: Addison-Wesley Publishing.
- Handoyo, Eko. 2009. *Pendidikan Anti Korupsi*. Semarang: Widya Karya.
- Harahab, H, M. 2009. *Ayat-Ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kartono, Kartini. 1997. *Psikologi Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Klitgaard, R. 2005. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- KPK. 2006. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: KPK.
- Kurniawan. 2010. *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*. Jakarta.
- Lickona, Thomas,. 1991. *Educating for Character How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Lucio, William H., McNeil, John D. 1969. *Supervision: a Shyntesis of Thought and Action New York: McGries Hill Book Company*.
- Maheka, A. 2006. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK
- Moleong Lexy J.,2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2006. *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- Muhajir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nata, Abuddin .2001. *Paradigma Pendidikan Islam*. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Jakarta: Grassindo
- Nasution, S. 1995. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qodir dkk,. 2003.*Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Media Wacana Press.
- S, Azwar. 2006. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strauss, Anselm & Juliet, Corbin (terj).2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet ke 2.
- Sugiono, 2005. *Metodologi Penelitian* . Bandung: CV Alfabeta.
- Suyanto, Totok. 2005. *Pendidikan Anti Korupsi dan Pengembangan Budaya Sekolah*. Yogyakarta: Gama Media
- Suyitno, ed. 2006. *Korupsi Hukum dan Moralitas Agama, Mewacanakan Fiqih Anti Korupsi*.Yogyakarta: Gama Media.
- Thompson, James.1993. *Developing Education*. Toronto: NewGrace.inc
- Thorndike R.L, & Hagen E., 1992. *Measurement & Evaluation in Psychology and Education*. Toronto: John Wiley and Sons Inc.
- Tilaar, HAR. 1999. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wade, C, dan Tavriss, C. 2007. *Psikologi*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, Agus. 2013. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijayanto, et. Al. (2010). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.